

Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Indonesia dan Filipina

Laras Pujaswari Truna¹ Aldo Nathanael R Ginting² Maritza Hasnadia Sumaryadi³ Reisy
Tepi Alhaq⁴ Fienaurisilmi⁵ Wan Fairuz Arkan Hibatullah⁶ Dian Fitriani Afifah^{7*}

¹⁻⁷Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 28 June 2024

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan, *Stunting*,
Indonesia, Filipina

Keywords:

Implementation, Policy, *Stunting*,
Indonesia, Philippines



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Indonesia dan Filipina merupakan kedua negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara dengan berbagai kesamaan yang dimiliki, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan geografinya. Berdasarkan kesamaan-kesamaan tersebut, kedua negara menghadapi tantangan yang serupa, yakni *stunting*. Pada tahun 2023, tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 17,8 persen sedangkan di Filipina mencapai 26,7 persen. Prevalensi *stunting* tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik secara internal (masyarakat) maupun eksternal (kondisi negara dan kebijakan yang berlaku). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur dalam membandingkan langkah kedua negara dalam menekan angka prevalensi *stunting*, dimulai dari implementasi kebijakan yang berlaku hingga program yang diusung. Berdasarkan data yang penulis peroleh, Indonesia berupaya mengimplementasikan kebijakan dan program dengan terdesentralisasi sedangkan Filipina mengimplementasikannya dengan tersentralisasi. Dengan begitu, apabila kebijakan di Indonesia dan Filipina ditukar dan diimplementasikan, tampaknya Filipina akan mengalami penurunan angka prevalensi *stunting* dengan cepat. Sementara itu, jika Indonesia menerapkan kebijakan seperti di

Filipina, dampaknya tidak akan sebesar yang diharapkan, melihat adanya perbedaan luas negara yang cukup jauh serta kebijakan di Filipina yang merupakan penyempurnaan dari kebijakan di Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia and the Philippines are two countries located in the Southeast Asian region with various similarities, such as social, economic, and geographical conditions. Based on these similarities, both countries face similar challenges, which is *stunting*. In 2023, the prevalence rate of *stunting* in Indonesia reached 17.8 percent while in the Philippines it reached 26.7 percent. The prevalence of *stunting* is caused by many factors, both internal (society behavior) and external (state conditions and applicable policies). The author uses a descriptive qualitative research method through literature studies in comparing the steps of the two countries in reducing the prevalence rate of *stunting*, starting from the implementation of applicable policies to the programs carried out. Based on the data obtained by the author, Indonesia seeks to implement policies and programs in a decentralized manner while the Philippines implements them in a centralized manner. That way, if the policies in Indonesia and the Philippines are exchanged and implemented, it seems that the Philippines will experience a rapid decline in the prevalence rate of *stunting*. Meanwhile, if Indonesia implements a policy like in the Philippines, the impact will not be as big as expected, considering the large difference in the size of the country and the policies in the Philippines which are improvements to the policies in Indonesia.

PENDAHULUAN

Stunting, yang juga dikenal sebagai gizi buruk kronis, merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak mengalami hambatan dan kekurangan tinggi badan dibandingkan anak-anak seusianya. Terdapat banyak dampak yang akan terjadi di samping pertumbuhan fisik anak, seperti adanya akibat jangka panjang terhadap kecerdasan, kemampuan belajar, dan bahkan tingkat produktivitasnya pada masa dewasa.

Stunting merupakan masalah yang mempengaruhi sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia dan Filipina. Serupa tetapi tidak sama, prevalensi *stunting* di Indonesia dan Filipina dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berbicara mengenai kondisi ekonomi, penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 25,9 juta jiwa atau setara dengan 9,36 persen dari total penduduk di Indonesia, sedangkan di Filipina berjumlah 25,24 juta

*Corresponding author

E-mail addresses: dian.afifah@unpad.ac.id

jiwa atau setara dengan 22,4 persen dari total penduduk di Filipina. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat ini pada akhirnya akan menimbulkan efek domino terhadap prevalensi *stunting* di kedua negara. Rendahnya pendapatan keluarga akan membuat rendah pula aksesibilitas mereka terhadap makanan yang berkualitas, berlanjut pada kurangnya gizi pada anak-anak mereka.

Melihat aspek lain, beberapa wilayah di Indonesia sendiri masyarakat masih memiliki akses yang minim terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Minimnya akses tersebut memengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat akan urgensi *stunting*. Selain itu, akses yang terbatas terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang tidak memadai mempengaruhi penyerapan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal. Selain kemiskinan, tingkat prevalensi *stunting* di Filipina disebabkan oleh minimnya edukasi mengenai reproduksi serta pemantauan tumbuh kembang anak. Akibatnya, banyak terjadi fenomena kehamilan remaja, yang tidak hanya belum siap secara fisik tetapi juga secara mental dan minimnya pengetahuan yang dimiliki. Ditambah lagi, beberapa wilayah di Filipina juga tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan program yang cukup berdampak pada masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang kapabel dalam bidang kesehatan.

Menekan angka prevalensi *stunting* menjadi urgensi yang tinggi di kedua negara. Apabila prevalensi tersebut tidak kunjung turun secara signifikan, bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2030-2040 akan menjadi malapetaka. Filipina juga akan mengalami kerugian besar, salah satunya secara finansial, yang hingga tahun 2015, kerugian tersebut sudah mencapai P254 miliar (Rp71,4 triliun), atau setara dengan 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Oleh karena itu, penanganan *stunting* memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* terkait, serta memperhatikan semua aspek, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, maupun lingkungan melalui berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini, penulis ingin membandingkan kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Penulis menggunakan model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter Dan Carl Van Horn yang didasarkan pada enam variabel seperti 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Perbandingan Pemerintahan

Perbandingan pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu perbandingan dan pemerintahan. Sjachran Basah (1994: 7), mendefinisikan perbandingan sebagai metode analisis antara dua atau lebih objek untuk memperdalam pemahaman tentang objek yang dianalisis. Sementara itu, pemerintahan merupakan proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara (Napitulu, 2012). Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya "Comparative Government," pemerintahan memiliki empat arti:

- (1) Merujuk pada kegiatan atau proses memerintah, yakni melakukan pengontrolan terhadap pihak lain kegiatan.
- (2) Memperlihatkan ihwal (masalah-masalah) negara, dimana kegiatan atau proses-proses di atas terjadi.
- (3) Menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah.
- (4) Menunjukkan cara, metode atau sistem masyarakat tertentu diperoleh.

Berdasarkan pengertian perbandingan dan pemerintahan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan pemerintahan merupakan kegiatan menyepadankan unsur-unsur pemerintahan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara objek-objek tersebut melalui analisis deskriptif yang mendalam. Menurut Duverger (1964), terdapat 3 (tiga) poin penting dalam perbandingan pemerintahan, diantaranya:

- (1) Menggali ide-ide ilmu sosial dan melacak perkembangan historisnya.
- (2) Menguraikan dan membahas teknik observasi yang berkaitan dengan kajian dokumen tertulis.
- (3) Menelaah penggunaan teori, hipotesis, klasifikasi, dan konseptualisasi dalam penelitian.

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan pemerintahan melibatkan analisis sistematis untuk memahami dan mengevaluasi berbagai aspek pemerintahan dengan tujuan memperdalam pengetahuan dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan yang signifikan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 196), implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya berbentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Mazmanian dan Sabatier (1983)

menyatakan bahwa fokus implementasi adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat setelah pengesahan kebijakan negara, yang dapat diadministrasikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut (Wahab, 2008, p. 65; Haerul et al., 2016, p. 26). Menurut Syukur dalam Surmayadi (2005:79), terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

- (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- (2) *target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
- (3) unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.

Menurut teori Donald Van Meter dan Van Horn (1975), terdapat enam variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

- (1) Standar dan sasaran kebijakan, harus jelas dan terukur agar dapat direalisasikan;
- (2) Sumber daya, baik berupa *human resource* atau sumber daya manusia yang berkualitas dan *non-human resource* atau sumber daya finansial yang memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan.
- (3) Hubungan antar organisasi, koordinasi dengan berbagai instansi dalam implementasi kebijakan;
- (4) Karakteristik agen pelaksana, meliputi norma, struktur birokrasi, dan pola hubungan dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi program;
- (5) Komunikasi antar organisasi, kualitas komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- (6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, sumber daya ekonomi dan kondisi lingkungan yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975) mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari tahap keputusan politik, pelaksanaan, hingga kinerja kebijakan publik. Dengan demikian, keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan bergantung pada hubungan antara variabel atau faktor yang terlibat dalam setiap tahap proses implementasi. Konsep ini menekankan pentingnya keterkaitan yang baik antara perencanaan kebijakan, eksekusi di lapangan, dan pencapaian hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada bab sebelumnya, fokus dalam penelitian ini terdapat pada konsep implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan membandingkan implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Indonesia dan Filipina berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya: 1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Hubungan antar organisasi; 4) Karakteristik agen pelaksana; 5) Komunikasi antar organisasi; dan 6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. (Donald Van Meter dan Van Horn, 1975).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. mengenai persentase prevalensi *stunting* di Indonesia dan Filipina dalam 5 tahun terakhir

Prevalensi <i>Stunting</i> Pada Balita Tahun 2018-2023						
Negara	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	30,8 persen	27,6 persen	22 persen	24,4 persen	21,6 persen	17,8 persen
Filipina	30,3 persen	28,8 persen	29,7 persen	29 persen	28,8 persen	26,7 persen

Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Data WHO

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam upaya mengurangi angka prevalensi *stunting*, Pemerintah Indonesia maupun Filipina telah berupaya menerapkan berbagai kebijakan dan program yang efektif dan efisien. Pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 telah mengatur target nasional pada tahun 2024, prevalensi *stunting* turun hingga 14%. Selain melalui RPJMN, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72

tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) yang diketuai oleh Wakil Presiden RI mendorong dalam percepatan penurunan stunting, agar efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (SNAPPS), yang menjadi kerangka kerja utama dalam penanganan masalah ini. Pemerintah pun mengalokasikan dana sebesar Rp26 triliun untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting. Kebijakan ini dilengkapi dengan program intervensi utama yang ditujukan pada pencegahan stunting di kalangan perempuan, yang merupakan kelompok rentan dalam siklus kehidupan stunting. Pemerintah juga merancang Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) dan melakukan survei melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk memantau perkembangan dan efektivitas program secara teratur.

Lebih lanjut, upaya penanganan stunting di Indonesia dilakukan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, yang memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah pusat merancang insentif fiskal untuk mendukung daerah-daerah dalam menurunkan angka stunting, seperti pemotongan anggaran APBN guna percepatan penurunan angka stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah stunting secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hasilnya, Indonesia berhasil mencatat penurunan angka stunting dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 72,9 persen pada tahun 2022. Peningkatan IPM dan penurunan stunting ini memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan yang berpengaruh dan berdedikasi dalam mengatasi permasalahan tersebut, terutama dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp3.212 triliun dari tahun 2015 hingga 2023.

Di sisi lain, Filipina telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam upaya mengatasi tantangan stunting. Mereka telah mengajukan pinjaman kepada Bank Dunia dan merancang Philippine Plan of Action for Nutrition (PPAN) yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan Filipina. Namun, laporan Department of Health (DOH) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Filipina masih menghadapi tantangan besar dalam upaya mengurangi angka stunting. Masalah-masalah yang masih dihadapi termasuk infrastruktur kesehatan yang kurang memadai, kekurangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan kurangnya koordinasi efektif antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah.

Sumber Daya

Berbicara mengenai sumber daya, aspek ini penting dalam memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, baik dari manusianya, alamnya, dan ekonominya. Pada konteks kualitas pembangunan sumber daya manusia, skor Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menempati posisi keenam di Asean dengan skor 0,713 sementara Filipina menempati posisi ketujuh dengan skor 0,710 pada Tahun 2022 (UNDP). Perbandingan skor yang kecil dan rendah menunjukkan bahwa kondisi kualitas SDM Indonesia masih tergolong kurang, tentunya hal ini akan menghambat proses implementasi kebijakan. Filipina pun serupa, negara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding Indonesia memiliki skor IPM yang berada di bawah Indonesia.

Selanjutnya, sumber daya non manusia, yakni ekonomi. Finansial memegang peran penting dalam terimplementasinya suatu kebijakan. PDB Indonesia pada tahun 2023 menyentuh angka 5,04 persen sementara Filipina memegang poin lebih tinggi, yakni 5,5 persen, namun angka inflasi di Filipina menyentuh 5 persen sementara Indonesia hanya sebesar 2,61 persen (Menko Ekonomi) artinya terdapat kesulitan dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari di Filipina mengingat Filipina memiliki permasalahan kemiskinan ekstrem pula. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina harus meminjam uang ke Bank Dunia dalam membantu implementasi kebijakan penanganan *stunting* ini, mengingat kondisi ekonomi kedua negara ini belum stabil. Pada tahun 2023 Indonesia meminjam sebesar \$600 juta atau sebesar Rp8,99 triliun rupiah guna mengurangi *stunting* di dalam negeri. Sementara Filipina meminjam sebesar \$178,1 juta atau sebesar Rp 2,8 triliun untuk negaranya. Bentuk keseriusan dalam mengimplementasikan kebijakannya terhadap stunting, Indonesia bahkan memotong APBN untuk mendorong penanganan *stunting* pada skala daerah yakni kota/kabupaten. Kemiskinan di Indonesia menyentuh angka 9,36 persen sementara Filipina 22,4 persen, hal ini tentu menjadi faktor pendorong yang cukup besar dalam implementasi kebijakan *stunting*.

Hubungan Antar Organisasi

Pemerintah Indonesia telah memperlihatkan komitmen serius dalam menangani masalah *stunting* dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program. Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat dijamin tanpa adanya kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menetapkan target penurunan angka *stunting* menjadi 14 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Presiden

menggarisbawahi perlunya kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat lintas sektoral, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan.

Di Indonesia, hubungan antar organisasi terkait penanganan stunting melibatkan berbagai entitas seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat sipil. Kerjasama lintas sektor dan lintas daerah menjadi kunci dalam upaya mengintegrasikan kebijakan dan program untuk mengurangi prevalensi stunting. Pemerintah pusat memiliki peran koordinatif yang penting dalam menyatukan berbagai inisiatif dari level daerah dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Meskipun demikian, tantangan terjadi dalam koordinasi antar lembaga, terutama dalam hal harmonisasi kebijakan dan pendanaan serta implementasi yang konsisten di seluruh wilayah yang beragam.

Berbicara mengenai kolaborasi lintas sektor, berikut adalah beberapa program kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, akademisi, masyarakat, hingga media Indonesia dalam upaya menekan angka prevalensi stunting:

- (1) Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD-HI), merupakan pengimplementasian kebijakan yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengajak kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lembaga luar UNICEF sebagai mitra pembangunan (Kemenko PMK). Program ini berupa pemberian layanan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, yang kemudian dilanjutkan dengan pelayanan kepada ibu hamil dan anak mulai dari dalam kandungan hingga usia 6 tahun.
- (2) Aplikasi Cegah *Stunting* (Ayo Ceting), merupakan aplikasi berbasis *android* yang diciptakan oleh Puskesmas Andalas di Kecamatan Padang Timur Kota Padang, aplikasi ini digunakan ibu hamil dan balita untuk memantau kesehatan dan gizi mereka melalui perangkat *mobile*, serta berinteraksi dengan tenaga kesehatan untuk konsultasi dan edukasi.
- (3) Program Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS), program ini diluncurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), program ini, memberikan bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi langsung kepada anak-anak dari keluarga berisiko *stunting* kategori kurang mampu.
- (4) Layanan *Telemedicine*, merupakan program kolaborasi perusahaan-perusahaan (swasta) rintisan kesehatan seperti *Halodoc*, menawarkan layanan telekonsultasi, penghantaran obat, dan pembuatan janji untuk layanan kesehatan offline.
- (5) Upaya Penanganan *Stunting* Oleh Tim Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), tim Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) melakukan sebuah inisiatif berupa terobosan yang dinilai menonjol. Terobosan ini merupakan inisiasi Profesor Damayanti Rusli sebagai pimpinan RSCM, dengan metode yang mereka terapkan, prevalensi *stunting* berhasil menurun hingga 8 persen hanya dalam jangka waktu enam bulan.
- (6) Poster Pintar, Program ini merupakan hasil kolaborasi antara *1000 Day Fund*, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan *Smart Chart Give Away*, yang bertujuan untuk memberikan edukasi yang mudah diakses kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan bayi dalam rentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Di sisi lain, hubungan organisasi di Filipina dalam penanganan stunting cenderung lebih terpusat dengan pemerintah pusat memainkan peran utama. Pemerintah Filipina memiliki kendali yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan mengarahkan implementasi di seluruh negara. Selain itu, partisipasi aktif dari NGO dan lembaga swasta juga mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi stunting. Meskipun struktur ini dapat memberikan kejelasan dalam arah kebijakan dan konsistensi dalam implementasi, tantangan timbul dalam menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan lokal yang beragam serta memastikan partisipasi yang inklusif dari semua stakeholder. Berikut adalah program-program inovatif yang dimiliki Filipina:

- (1) Kolaborasi DOST (*Department of Science and Technology*) dan Sektor Swasta, DOST-FNRI (*Food and Nutrition Research Institute*) mengembangkan paket-paket yang dapat dibeli oleh mitra sektor swasta untuk inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mereka. Paket-paket tersebut mencakup berbagai jumlah dan manfaat, mulai dari P120.000 (Rp33,7 juta) untuk 50 anak selama 120 hari pemberian makan; P180.000 (Rp50,9 juta) untuk 75 anak selama 120 hari pemberian makan; P240.000 (Rp67,4 juta) untuk 100 anak selama 120 hari pemberian makan; hingga P2,25 juta (Rp632 juta) untuk penyediaan peralatan produksi makanan pendamping.
- (2) Poster Pintar oleh *Zuellig Family Foundation (ZFF)*, sebuah organisasi di Filipina yang mengadopsi metode pencegahan yang telah terbukti efektif di Indonesia. Salah satu metode yang dipilih adalah Poster Pintar, yang dikembangkan oleh organisasi nirlaba 1000 Days Fund. ZFF berencana untuk

mengintegrasikan Poster Pintar ke dalam program tata kelola gizi provinsi sebagai alat pemantauan keluarga.

- (3) *World Food Programme* (WFP), program Pangan Dunia pertama kali beroperasi di Filipina pada tahun 1968 dan kembali hadir pada tahun 2006 atas permintaan Pemerintah untuk mendukung proses perdamaian di wilayah Mindanao.

Secara umum, Indonesia cenderung mengandalkan pendekatan desentralisasi yang mengharuskan koordinasi yang lebih intens antara berbagai entitas pemerintah dan non-pemerintah di tingkat daerah. Ini memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal namun sering kali memerlukan upaya lebih besar dalam harmonisasi kebijakan dan implementasi yang seragam di seluruh wilayah. Di sisi lain, Filipina mengadopsi pendekatan sentralisasi yang memberi kejelasan dalam arah kebijakan namun mungkin membatasi fleksibilitas dalam respons terhadap kebutuhan lokal yang beragam.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia dan Filipina menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam pendekatan dan implementasi kebijakan. Di Indonesia, sistem yang dominan adalah desentralisasi, di mana otonomi daerah memainkan peran kunci dalam pengelolaan kebijakan. Dalam konteks geografi yang beragam seperti kepulauan Indonesia, desentralisasi memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih baik dengan kondisi lokal yang berbeda-beda. Struktur birokrasi Indonesia mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tingkat desa, masing-masing dengan peran dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan stunting. Namun, tantangan utama adalah kesenjangan yang signifikan dalam efektivitas implementasi kebijakan antarwilayah.

Sementara itu, di Filipina, pendekatan yang dominan adalah sentralisasi, di mana pemerintah pusat memegang kendali utama dalam arah kebijakan dan pelaksanaannya. Struktur birokrasi Filipina didasarkan pada kontrol yang lebih kuat dari pemerintah pusat, yang memberikan kejelasan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan. Dukungan yang kuat dari organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat turut memperkuat efektivitas program, seperti yang terbukti dengan penurunan prevalensi stunting yang signifikan selama periode tertentu. Meskipun demikian, tantangan dalam koordinasi lintas sektor dan interaksi antar level pemerintahan tetap menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi dan dampak kebijakan.

Dengan demikian, perbedaan dalam karakteristik agen pelaksana kebijakan di kedua negara ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi tantangan stunting. Indonesia dapat belajar dari model sentralisasi Filipina dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga dan konsistensi implementasi kebijakan nasional. Sebaliknya, Filipina dapat mengambil inspirasi dari desentralisasi Indonesia dalam menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lokal yang beragam, serta memperkuat kapasitas administratif di tingkat daerah untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan.

Komunikasi Antar Organisasi

Di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan penurunan angka stunting melalui tujuh aksi konvergensi menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai tingkatan pemerintahan dan stakeholder, seperti terlihat dalam perbedaan interpretasi kebijakan dan kurangnya transparansi informasi. Selain itu, kapasitas administratif yang terbatas di tingkat daerah juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan stunting di Indonesia.

Di sisi lain, di Filipina, kebijakan yang lebih terpusat di bawah pengawasan pemerintah pusat melalui Program Aksi Gizi Filipina (PPAN) menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan stunting. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya koordinasi efektif di tingkat lokal, kekhawatiran tentang kualitas data, dan kurangnya pelatihan bagi personel yang terlibat dalam implementasi PPAN. Meskipun pendekatannya lebih terpusat, masih diperlukan upaya untuk memperbaiki koordinasi dan kapasitas implementasi guna mencapai target global terkait gizi.

Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Filipina perlu terus meningkatkan komunikasi antar organisasi, memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas daerah, serta meningkatkan kapasitas administratif di semua tingkatan untuk mengatasi tantangan yang ada dalam penanganan stunting. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan terpusat Filipina dalam mengkoordinasikan kebijakan, sementara Filipina dapat mempertimbangkan model desentralisasi dan sinergi antar lembaga yang diterapkan oleh Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program penurunan stunting.

Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Berdasarkan data resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada bulan Desember 2023, populasi Indonesia mencapai sekitar 280,73 juta jiwa. Dengan prevalensi *stunting* yang ada di Indonesia, tantangan kesehatan masyarakat menjadi fokus terhadap jumlah angka kematian pada bayi dan kematian pada anak di bawah 5 Tahun di Indonesia yang tergolong relatif tinggi, yaitu sebanyak 17,6 dan 21,3 per 1000 kelahiran hidup. Data tersebut salah satunya diakibatkan oleh kondisi sosial yang kurang sejahtera di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 25,9 juta jiwa, atau setara dengan 9,36 persen dari total penduduk di Indonesia. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia menimbulkan efek jangka panjang terhadap kehidupan sang anak, seperti minimnya asupan gizi yang diterima hingga akhirnya menimbulkan *stunting* pada anak. *Stunting* sendiri secara langsung dapat memengaruhi kemampuan kognitif anak. Rendahnya kemampuan kognitif seseorang dapat memperkecil peluangnya dalam bersaing di dunia kerja. Rendahnya pendapatan keluarga akan membuat rendah pula aksesibilitas mereka terhadap makanan yang berkualitas, berlanjut pada kurangnya gizi pada anak-anak mereka. Dengan begitu, tingginya angka *stunting* ini diperburuk oleh adanya ketimpangan ekonomi dan rendahnya aksesibilitas beberapa keluarga terhadap sumber daya dan kesempatan.

Prevalensi *stunting* akan menjadi mimpi buruk bagi masa depan Indonesia. Hal ini dikarenakan bonus demografi di Indonesia akan berlangsung pada tahun 2030-2045. Pada tahun 2045, terdapat 70 persen jumlah penduduk Indonesia dengan usia produktif (15-64 tahun). Dengan kualitas generasi penerus bangsa yang rendah, yang salah satunya diakibatkan oleh *stunting*, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terancam. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia harus sigap dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, salah satunya dengan menurunkan prevalensi *stunting* secara signifikan.

Kondisi politik di Indonesia saat ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk prevalensi *stunting* dan kebijakannya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang saat ini sedang menjalani masa jabatan kedua, berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan reformasi birokrasi. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk menangani masalah *stunting*, seperti program nasional penurunan *stunting* yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Komitmen politik ini mencerminkan upaya serius pemerintah untuk mengatasi masalah gizi kronis yang mempengaruhi jutaan anak di Indonesia.

Namun, tantangan politik tetap ada. Desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah sering kali menimbulkan variasi dalam pelaksanaan program-program nasional di tingkat lokal. Beberapa daerah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penurunan angka *stunting* berkat kepemimpinan yang efektif dan alokasi anggaran yang tepat, sementara daerah lain masih berjuang dengan masalah tata kelola, korupsi, dan kurangnya kapasitas administrasi. Selain itu, dinamika politik internal, seperti konflik antara partai politik, perubahan kebijakan akibat pergantian menteri, dan ketidakstabilan politik di beberapa wilayah, dapat menghambat konsistensi dan efektivitas program-program pemerintah. Dengan demikian, meskipun ada upaya serius dari pemerintah pusat, keberhasilan penanganan *stunting* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang bervariasi di tingkat lokal dan tantangan struktural yang masih harus diatasi.

Dengan berbagai bauran kebijakan dan dukungan APBN, Indonesia juga berhasil menghadapi tekanan cukup dalam akibat moderasi harga komoditas. Tercatat harga gas turun 38,8 persen, minyak mentah 10,3 persen, minyak sawit 12,3 persen, bahkan batu bara turun hingga 63,8 persen. Hingga triwulan ke-3 tahun 2023, ekonomi nasional secara kumulatif mampu tumbuh 5,05 persen. Konsistensi pertumbuhan ini menandakan daya tahan dan kinerja perekonomian Indonesia yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Resiliensi ini nampak dari pertumbuhan permintaan domestik dan supply yang tercatat masih kuat hingga triwulan 3-2023. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen dan investasi 4,2 persen. Sedangkan ekspor tumbuh tipis 1,1 persen dan impor melemah -2,0 persen imbas pelemahan ekonomi global. Sementara sisi produksi juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Sektor transportasi, akomodasi makan minum, dan infokom menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Sektor pertambangan juga mampu tumbuh 5,7 persen di tengah moderasi harga komoditas global.

Inflasi Indonesia juga terkendali di level 2,61 persen per Desember 2023. Jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi 2023 yang sebesar 3,6 persen. Inflasi *volatile food* yang menjadi kontributor utama inflasi seperti beras, cabai, dan bawang putih juga mulai menunjukkan tren menurun di Desember 2023. Selanjutnya di sektor perdagangan, meskipun ekspor dan impor cenderung berada di zona negatif sejak awal 2023 akibat melemahnya perekonomian global, khususnya negara-negara mitra dagang utama

Indonesia. Namun, neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan kinerja positif dan mencatatkan surplus 43 bulan berturut-turut. Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari hingga November 2023 mencapai 33,63 miliar dolar Amerika Serikat.

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, tingginya prevalensi *stunting* di Filipina merupakan cerminan dari tantangan yang kompleks dalam bidang kesehatan dan sosial yang dihadapi oleh negara tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi *stunting* tidak hanya terbatas pada masalah gizi, tetapi juga mencakup aspek-aspek kemiskinan yang meluas di negara ini. Meskipun Filipina telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan tidaklah sejelas yang diharapkan. Banyak keluarga, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, masih kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, terutama bagi anak-anak mereka yang rentan terhadap *stunting*.

Menurut *Third Quarter 2023 Social Weather Survey*, terdapat sekiranya 1 dari 10 keluarga yang mengalami kelaparan secara tidak sengaja. Penelitian oleh Institut Studi Pembangunan Filipina pada tahun 2022 mengaitkan hal ini dengan harga pangan yang tinggi, terutama untuk makanan bergizi, yang membuatnya sulit dijangkau oleh banyak rumah tangga. Masalah ini menjadi lebih buruk seiring dengan meningkatnya harga barang pokok. Di samping itu, data resmi juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Filipina tidak merata di seluruh wilayah negara itu. Provinsi-provinsi dengan proporsi tertinggi anak-anak yang mengalami ketidakamanan pangan juga merupakan provinsi-provinsi yang mencatat prevalensi *stunting* di atas rata-rata nasional. Tingginya angka kemiskinan di Filipina juga mengakibatkan rendahnya aksesibilitas masyarakat Filipina terhadap pendidikan, terutama edukasi terkait kesehatan reproduksi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Salah satu akibatnya, kehamilan pada remaja yang belum siap secara mental, fisik, dan edukasi seringkali terjadi di Filipina. Wanita hamil remaja cenderung memiliki risiko gizi yang lebih tinggi dan mungkin tidak mampu memberikan nutrisi yang cukup kepada bayi yang sedang dikandungnya. Praktik pemberian ASI yang kurang optimal juga dapat menyebabkan defisiensi nutrisi pada bayi, yang berkontribusi pada terjadinya *stunting*.

Kondisi politik di Filipina saat ini memiliki dampak signifikan terhadap prevalensi *stunting*, terutama karena kebijakan dan program penurunan *stunting* dikelola secara sentral oleh pemerintah nasional. Di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., terdapat komitmen yang kuat untuk meningkatkan pengeluaran di sektor kesehatan dan pendidikan, mencerminkan upaya serius dalam menangani masalah gizi kronis. Namun, pengelolaan kebijakan yang terpusat ini justru mempengaruhi pemerataan penurunan prevalensi *stunting*. Karena cakupannya yang terlalu luas, implementasi kebijakan seringkali kurang efektif dan efisien, serta tidak merata di berbagai daerah di Filipina.

Pemerintah Filipina, menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah gizi kronis dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan memanfaatkan pinjaman dari Bank Dunia untuk memperkuat program gizi. Pada tahun 2021, Filipina mengajukan pinjaman sebesar \$200 juta untuk meningkatkan program gizi, terutama untuk unit pemerintahan daerah (LGUs). Dana ini difokuskan pada integrasi pelayanan kesehatan primer, pemberian pelayanan gizi berbasis masyarakat, dan penguatan badan pelaksana utama. Selain itu, sebelum Presiden Rodrigo Duterte mengakhiri masa jabatannya, pemerintah merencanakan pinjaman tambahan sebesar \$178,1 juta untuk meningkatkan program gizi yang sensitif terhadap kondisi gizi. Langkah ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan gizi buruk dan *stunting* pada anak-anak.

Stabilitas politik dan hubungan internasional juga memainkan peran penting dalam keberlanjutan upaya penurunan *stunting* di Filipina. Upaya pemerintah untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Barat serta tetap aktif dalam ASEAN merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan stabilitas regional dan ekonomi, yang diharapkan dapat membawa investasi dan teknologi yang mendukung pembangunan domestik, termasuk di sektor kesehatan dan nutrisi. Isu-isu seperti reformasi agraria dan keamanan pangan menjadi sangat relevan, karena kebijakan yang mendukung reformasi agraria dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil dapat langsung mempengaruhi kualitas gizi anak-anak di Filipina. Program-program yang bertujuan untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan memastikan pasokan pangan yang cukup sangat penting dalam mengendalikan inflasi dan menyediakan makanan yang terjangkau bagi populasi yang rentan. Dengan pinjaman dari Bank Dunia dan komitmen untuk memperkuat sistem kesehatan primer serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, Filipina berharap dapat mengurangi prevalensi *stunting* dan meningkatkan kualitas hidup generasi masa depan. Keberhasilan dalam mengatasi *stunting* sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola program-program ini dengan efektif dan mengatasi tantangan-tantangan politik internal seperti korupsi dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Pada tahun 2023, ekonomi Filipina menunjukkan pertumbuhan yang kuat, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan adanya peningkatan investasi publik. Pertumbuhan ekonomi pada

tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar 5,6 persen, menjadikannya salah satu yang tercepat di Asia Tenggara. Faktor pendorong utamanya meliputi konsumsi rumah tangga yang kuat, pemulihan di sektor jasa, dan belanja infrastruktur publik yang berkelanjutan. Meskipun Filipina telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan tidaklah sejelas yang diharapkan. Banyak keluarga, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Filipina menghadapi beberapa tantangan ekonomi, termasuk inflasi yang lebih tinggi, mencapai 5 persen pada tahun 2023 yang berdampak pada biaya hidup dan biaya operasional perusahaan. Inflasi telah mendorong Bank Sentral Filipina (BSP) untuk meningkatkan suku bunga sebanyak 450 basis poin sejak Mei 2022 untuk mengendalikan tekanan inflasi.

Meningkatnya inflasi di Filipina tentu saja memengaruhi kenaikan harga bahan pokok, termasuk biaya pangan di Filipina. Tingginya biaya pangan di Filipina tidak dijangkau oleh sebagian masyarakat di sana. Meskipun terdapat beberapa pilihan makanan yang murah, seringkali makanan tersebut kurang mengandung nutrisi yang dibutuhkan. Menurut *Global Food Security Index in 2022*, Filipina merupakan ekonomi paling rentan pangan di Asia. Di mana yang paling terdampak adalah mereka yang paling miskin di antara masyarakat, yang juga mengalami tingkat malnutrisi tertinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan implementasi kebijakan dan programnya, penanganan stunting di Indonesia lebih unggul dibandingkan Filipina, terbukti dari turunnya persentase prevalensi stunting secara signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dari tahun 2018 hingga 2023, prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 30,8 persen menjadi 17,8 persen, mencerminkan efektivitas pendekatan desentralisasi yang memungkinkan penanganan yang lebih holistik, sinergis, dan integratif hingga ke tingkat kelurahan. Sebaliknya, angka penurunan prevalensi stunting di Filipina cenderung stagnan, hanya mengalami penurunan dari 30,3 persen menjadi 26,7 persen dalam periode yang sama. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Filipina dengan pengelolaan kebijakan yang tercentralisasi, yang sering kali kurang efektif dan efisien dalam memastikan pemerataan sumber daya dan implementasi program di seluruh daerah.

Perbedaan signifikan dalam hasil ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal untuk mengatasi masalah kesehatan publik seperti *stunting* secara lebih efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan dan program di Indonesia dan Filipina tentunya dipengaruhi oleh enam variabel kunci dalam model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Variabel tersebut meliputi: standar dan sasaran kebijakan yang ditetapkan, alokasi sumber daya yang memadai, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana terhadap kebijakan, efektivitas komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing negara. Implementasi kebijakan yang berhasil mempertimbangkan secara holistik variabel-variabel ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penurunan prevalensi stunting dan masalah kesehatan publik lainnya di kedua negara tersebut.

REFERENSI

- Aditya, M. (5 September, 2023). *Tingkat Kemiskinan Di Asia Tenggara 2023*. Diakses pada 9 April, 2024, dari <https://goodstats.id/infographic/tingkat-kemiskinan-di-asia-tenggara-2023-HBHv1>
- Barba, Corazon V C. (Desember 2000). *The Philippine Plan of Action for Nutrition: An Overview*. Diakses pada 15 April, 2024, dari https://www.researchgate.net/publication/262963528_The_Philippine_Plan_of_Action_for_Nutrition_An_Overview
- BPS. (5 Februari, 2024). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen (y-on-y)*. Diakses pada 10 April, 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y.html>
- Deviana, Jesica. (30 Juni, 2023). *Permasalahan Stunting di Indonesia dan Penyelesaiannya*. Diakses pada 8 April, 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/16261/Permasalahan-Stunting-di-Indonesia-dan-Penyelesaiannya.html>
- Gladys, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara (Analysis of Risk Factors of Stunting Among Children 0-59 Months in Developing Countries and Southeast Asia)*. Diakses pada, 10 April, 2024, dari <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/mpk/article/view/472>
- Humas BPS. (30 Juni, 2023). *Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2020-2021*. Diakses pada 9 April, 2024, dari

- <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/06/30/1f63a5554f9d010c7aa4f9dd/laporan-indeks-khusus-penanganan-stunting-2020-2021.html>
- Humas Kominfo. (Maret 2022). *Akselerasi Penurunan Stunting Pemerintah Terapkan RAN PAUD-HI*. Diakses pada 9 April, 2024, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40343/akselerasi-penurunan-stunting-pemerintah-terapkan-ran-paud-hi/0/berita>
- Humas Setkab RI. (11 Februari 2024). *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024*. Diakses pada 10 April, 2024, dari <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>
- Humas Stekom. (2022). *Politik Filipina*. Diakses pada 10 April, 2024, dari <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Politik Filipina>
- Kurnia, Galuh Mega. *Kesehatan untuk Semesta? Pemerataan Infrastruktur Harus Segera Dituntaskan*. Universitas Airlangga. Diakses pada 10 April, 2024, dari <https://fkm.unair.ac.id/kesehatan-untuk-semesta-pemerataan-infrastruktur-harus-segera-dituntaskan/>
- Kurniawan, Wahyu dan Karjuni Dt. Maan. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn*. Diakses 10 April, 2024, dari file:///C:/Users/airoh/Downloads/Documents/95-Article%20Text-141-1-10-20200316.pdf
- Lestari, Tri Rini Puji. (Juli 2023). *Stunting di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya*. Info Singkat Vol. XV, No. 14/II/Pusaka/Juli/2023. Diakses pada 9 April, 2024, dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_persen20Singkat-XV-14-II-P3DI-Juli-2023-196.pdf
- Mbuya, Nkosinathi V. N, Gabriel D. (15 Juni, 2021). *Undernutrition in the Philippines: Scale, Scope, and Opportunities for Nutrition Policy and Programming*. Diakses pada 10 April, 2024, dari <https://www.worldbank.org/en/country/philippines/publication/-key-findings-undernutrition-in-the-philippines>
- Ocha (26 September, 2023). *The Philippines Renews Its Commitment To Nutrition With Updated Action Plan*. Diakses pada 15 April, 2024, dari <https://reliefweb.int/report/philippines/philippines-renews-its-commitment-nutrition-updated-action-plan>
- Pena, Kurt Dela. (14 Juni, 2022). *Duterte's Last Loan of \$178 Million dari World Bank Eyes 2022 Target Against Stunting*. Diakses pada 14 April, 2024, dari <https://asianews.network/dutertes-last-loan-of-178-million-dari-world-bank-eyes-2022-target-against-stunting/>
- Putriningtias, A. (1 Agustus, 2023). *Metode Pencegahan Stunting Indonesia Ditiru 2 Negara Ini*. Diakses pada 15 April, 2024, dari <https://www.medcom.id/gaya/fitness-health/ybJmgEwN-metode-pencegahan-stunting-indonesia-ditiru-2-negara-ini>
- Tim Sekretariat Wakil Presiden. (23 Agustus, 2019). *Perangi Stunting Dengan Jaga Periode Usia Emas*. Diakses pada 8 April, 2024, dari <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/980/perangi-stunting-dengan-jaga-periode-usia-emas>
- Tim Sekretariat Wakil Presiden. (6 Oktober, 2023). *Rakornas 2023: Pastikan Prevalensi Stunting Turun Menjadi 14 persen Pada Tahun 2024*. Diakses pada 8 April, 2024, dari <https://stunting.go.id/rakornas-2023-pastikan-prevalensi-stunting-turun-menjadi-14-pada-tahun-2024/>
- Tim Sekretariat Wakil Presiden. (24 November, 2020). *Menggembirakan, Prevalensi Stunting di Indonesia Terus Menurun*. Diakses pada 9 April, 2024, dari <https://www.wapresri.go.id/menggembirakan-prevalensi-stunting-di-indonesia-terus-menurun/>
- Tim Sekretariat Wakil Presiden. (28 Agustus, 2020). *Tukar Pengetahuan Pencegahan Stunting Indonesia-Filipina*. Diakses pada 8 April, 2024, dari <https://stunting.go.id/tukar-pengetahuan-pencegahan-stunting-indonesia-filipina/>
- WFP Team. (2024). *WFP Philippines Country Brief February 2024*. Diakses pada 15 April, 2024, dari <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000157258/download/? ga=2.145016820.192051214.1713246969-307409675.1713246969>